

ANALISIS HUBUNGAN KAUSALITAS PAJAK RESTORAN DAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO REGIONAL DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Purwanto

Politeknik Keuangan Negara STAN

Rd. Tatan Jaka Tresnajaya

Politeknik Keuangan Negara STAN

Ida Zuraida

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak

Alamat Korespondensi: p.purwanto@pknstan.ac.id

Informasi Artikel

Diterima Pertama
[02 12 2022]

Dinyatakan Diterima
[26 12 2022]

KATA KUNCI:

Pajak Restoran, Vector Autoregressive (VAR), Kausalitas Granger, produk domestik regional bruto, indikator makro ekonomi regional

KLASIFIKASI JEL: H24

ABSTRAK

In 2020 the realization of regional government revenue of Anambas Islands Regency is the lowest in the Riau Archipelago Province. Regional taxes are an important component of regional government revenue. About 49% of regional tax revenue of Anambas Islands Regency derives from restaurant taxes. Research on taxes and macroeconomic indicators using data series models is mostly done at national level. Regional tax research generally uses OLS regression model. This study aims to analyze the relationship between restaurant taxes and regional macroeconomic indicators in Anambas Islands Regency using a time series data analysis model. The analysis was carried out on restaurant tax data and regional macroeconomic indicators, namely inflation rates, interest rates, and gross regional domestic product (PDRB) for 2012 - 2019. Based on tests on the character of the data, the most suitable analysis model is vector autoregressive (VAR) at difference. The results of the Granger causality test show that restaurant taxes and the inflation rate have a bidirectional causal relationship. PDRB growth and interest rate have a unidirectional causal

relationship to restaurant taxes. PDRB growth has a unidirectional causal relationship to inflation rate. Inflation rate has a unidirectional causal relationship to interest rate.

Pada tahun 2020 realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah yang terendah di Provinsi Kepulauan Riau. Pajak daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah. Sekitar 49% penerimaan pajak daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari pajak restoran. Penelitian pajak dan indikator ekonomi makro menggunakan model data series banyak dilakukan pada data tingkat nasional. Penelitian pajak daerah umumnya menggunakan model regresi OLS. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan pajak restoran dan indikator ekonomi makro regional di Kabupaten Kepulauan Anambas menggunakan model analisis *data time series*. Analisis dilakukan atas data pajak restoran dan indikator makro ekonomi regional, yaitu tingkat inflasi, suku bunga, dan produk domestik regional bruto (PDRB) tahun 2012 - 2019. Berdasarkan uji atas karakter data, model analisis yang paling sesuai adalah *vector autoregressive* (VAR) pada *difference*. Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan pajak restoran dan tingkat inflasi memiliki hubungan kausal dua arah. Pertumbuhan PDRB dan bunga memiliki hubungan kausal searah terhadap pajak restoran. Pertumbuhan PDRB memiliki hubungan kausal searah terhadap inflasi. Inflasi memiliki hubungan kausal searah terhadap bunga.

1. PENDAHULUAN

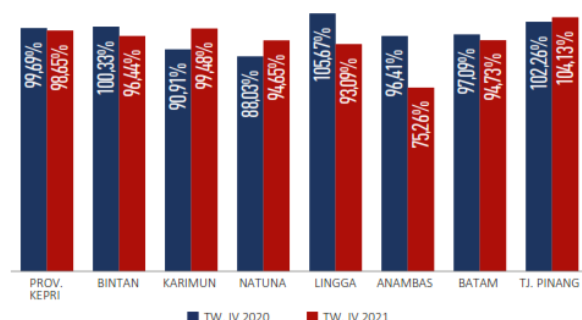
Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, pemerintah pusat telah melimpahkan Sebagian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini otonomi daerah merupakan suatu instrumen politik dan instrumen administrasi yang digunakan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal sehingga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya (Ristanti & Handoyo, 2017). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa setiap kabupaten atau kota memiliki peran yang lebih besar untuk dapat mengatur sendiri urusan pemerintahan masing-masing termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki, untuk mewujudkannya daerah memerlukan pembiayaan dan dana (Sun'an & Senuk, 2015). Untuk lebih mengoptimalkan potensi pembiayaan mandiri, pemerintah daerah perlu menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, PAD adalah segala pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang berperan penting dalam upaya membantu peningkatan otonomi daerah (Asmuruf et al., 2015). Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.

Bank Indonesia dalam laporan perekonomian regional menyatakan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas triwulan IV tahun 2021 menunjukkan persentase paling rendah di Provinsi Kepulauan Riau. Grafik 1 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah Kepulauan Anambas sampai dengan triwulan IV tahun 2021 sebesar 72.6%. Capaian persentase ini merupakan yang terendah dibandingkan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Grafik 1 : Realisasi Pendapatan Daerah Triwulan IV 2021



Sumber : Bank Indonesia (2022)

Kemandirian fiskal dapat dicapai dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagai sumber pendapatan utama daerah. Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 38,2 milyar rupiah PAD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2020, 18,4 milyar rupiah berasal dari pajak daerah. Pajak restoran memiliki kontribusi 9,2 milyar rupiah atau sekitar 49% dari jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2020.

Tabel 1 PAD dan Pajak Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

No	Deskripsi	Jumlah
1	PAD	Rp38.225.694.968
2	Pajak Daerah	Rp18.420.820.905
3	Pajak Restoran	Rp 9.251.640.339

Sumber : APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020

Pada tahun 2021 kontribusi penerimaan pajak restoran meningkat menjadi 59% terhadap total penerimaan pajak daerah. Jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Kepulauan Anambas ditunjukkan pada Tabel 2. Jumlah restoran di Kepulauan Anambas sampai dengan tahun 2020 menunjukkan peningkatan. Jumlah tersebut menurun sedikit di tahun 2021 sebagai dampak dari pandemi covid-19

Tabel 2 Jumlah Restoran di Kabupaten Kepulauan Anambas

Kecamatan Subdistrict	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jemaja	13	13	13	13
Jemaja Barat	0	0	0	0
Jemaja Timur	1	1	1	1
Siantan Selatan	0	0	0	0
Siantan	15	35	38	24
Siantan Timur	0	0	0	0
Siantan Tengah	0	0	0	0
Palmatak	7	7	7	6
Siantan Utara	0	0	0	0
Kute Siantan	NA	NA	0	4
Kepulauan Anambas	36	56	59	48

Sumber : BPS Kabupaten Anambas (2021)

Salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan pajak restoran adalah melakukan kajian terhadap faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak restoran.

Beberapa studi menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki hubungan dengan indikator ekonomi makro (Harun Yüksel, Mehmet Orhan, 2013; Alista, 2017; Ginanjar, 2012; Lestari & Masinabow, 2016). Indikator ekonomi makro tersebut meliputi produk domestik bruto (PDB), inflasi, suku bunga, dan pemberian kredit.

Tabel 3 menunjukkan produk domestik regional bruto (PDRB) dan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas. PDRB dan PDRB per kapita Kabupaten Kepulauan Anambas atas harga yang berlaku tahun 2017 – 2021 menunjukkan jumlah yang relatif konstan dan cenderung sedikit menurun. Penurunan mungkin disebabkan oleh efek pandemi covid-19.

PDRB Kepulauan Anambas pada tahun 2021 pada harga konstan 2010 adalah 11,11 triliun rupiah (BPS Kabupaten Anambas, 2021).

Tabel 3 : PDRB Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 - 2021

Uraian/Description	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB/GRDP Value (miliar rupiah/billion rupiahs)					
- Atas Dasar Harga Berlaku/at current price	17 258	16 849	17 434	14 454	16 698
- Atas Dasar Harga Konstan 2010/at 2010 constant price	13 142	12 063	12 047	11 104	11 108
PDRB Per Kapita/Per Capita GRDP (juta rupiah/million rupiahs)					
- Atas Dasar Harga Berlaku/at current price	416,74	401,87	412,05	338,15	342,60
- Atas Dasar Harga Konstan 2010/at 2010 constant price	317,36	287,72	284,75	259,78	227,93
- Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010/Growth of per capita GRDP at 2010 constant price	-1,28	-9,34	-1,03	-8,77	-12,26
Jumlah Penduduk/Population (orang/people)	41 412	41 927	42 309	42 744	48 737
Pertumbuhan Jumlah Penduduk/Population Growth (persen/percent)	1,20	1,24	0,91	1,03	14,02

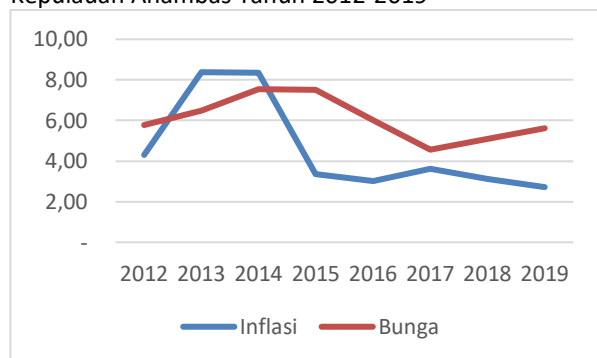
* Angka sementara/Preliminary Figures

** Angka sangat sementara/Very Preliminary Figures

Sumber : Badan Pusat Statistik, Kabupaten Kepulauan Anambas

Indikator ekonomi makro berupa tingkat inflasi dan suku bunga di Kabupaten Kepulauan Anambas ditunjukkan pada grafik 2.

Grafik 2 Tingkat Inflasi dan Suku Bunga di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2012-2019



Sumber : BPS Kepulauan Anambas

Dari tahun 2012 sampai dengan 2014 inflasi cenderung naik, dan setelah tahun 2014 cenderung menurun. Suku bunga bank menunjukkan peningkatan sampai dengan tahun 2015, dan berikutnya menunjukkan sedikit menurun.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan kausalitas antara penerimaan pajak restoran dan indikator ekonomi makro regional di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kontribusi dari penelitian ini adalah melakukan studi atas hubungan kausalitas antara pajak daerah dan indikator ekonomi makro daerah menggunakan model *time series*. Penelitian-penelitian terdahulu banyak menganalisis hubungan antara penerimaan pajak dan indikator ekonomi makro secara nasional menggunakan model *time series*, tapi masih sedikit yang meneliti hubungan antara penerimaan pajak daerah dengan indikator ekonomi makro secara regional menggunakan model analisis data *time series*.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pajak Restoran merupakan jenis pajak yang dipungut atas setiap pelayanan restoran (Nesare, V. C., Tinangon, J. J., & Warongan, 2016). Dalam hal ini pemungutan pajak restoran menggunakan sistem *withholding assesment*, yaitu besaran pajak yang

dibayar dihitung dan dipungut oleh pelaku usaha restoran. Kegiatan pemungutan pajak restoran dimulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, besarnya pajak terutang hingga penagihan dan pengawasan penyetoran pajak kepada wajib pajak.

Menurut Handaka (2017), pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya, termasuk jasa boga/katering. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Objek pajak adalah pelayanan makan dan minum yang disediakan oleh restoran, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dengan nilai penjualan/omset sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Tarif pajak ditetapkan dengan peraturan daerah dan paling tinggi 10%.

Para peneliti telah melakukan studi hubungan antara penerimaan pajak dan indikator ekonomi makro. Yüksel & Orhan (2013) melakukan studi hubungan antara penerimaan pajak dan indikator ekonomi makro di Turki. Uji kausalitas Granger menunjukkan bahwa penerimaan pajak tidak berhubungan dengan PDB, tingkat inflasi, tingkat bunga, dan perdagangan, tetapi penerimaan pajak memiliki hubungan kausal dua arah dengan kurs mata uang.

Ilaboya (2012) melakukan studi hubungan antara pajak tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi di Nigeria. Hasil studi menggunakan model *Autoregressive Distributed Lag* (ADL) menunjukkan ada hubungan negatif antara pajak tidak langsung dan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lain menunjukkan bahwa pajak memengaruhi pertumbuhan ekonomi (Popoola et al., 2017). Penelitian di Nigeria menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak dapat menyebabkan kontraksi ekonomi.

Beberapa penelitian atas pajak restoran di Indonesia telah dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori ekonomi makro (Alista, 2017; Ginanjar, 2012; dan Lestari & Masinabow, 2016). Penelitian tersebut kebanyakan menggunakan model regresi OLS. Penelitian Alista (2017) menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran dipengaruhi oleh jumlah wisatawan, laju inflasi dan Pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan berpengaruh terhadap penerimaan pajak restoran. Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) memiliki skor 97,7%, artinya variabel penerimaan pajak restoran dijelaskan sebesar 97,7% oleh variabel jumlah wisatawan, laju Inflasi, PDRB, sedangkan sisanya sebesar 2,3% dijelaskan oleh variabel lain.

Susanto (2018) melakukan penelitian terhadap perekonomian Indonesia tahun 1996 s.d. 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat inflasi dan tingkat bunga.

Penelitian Ginanjar (2012) di Kota Padang menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran dipengaruhi oleh PDRB, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan. Penelitian Lestari & Masinabow (2016) di Kota Manado menunjukkan penerimaan pajak restoran dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan pendapatan per kapita.

Selanjutnya, Dewi & Sutrisna (2014) melakukan penelitian atas pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil studi menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Umumnya penelitian atas hubungan antara penerimaan pajak dan indikator ekonomi makro dengan model data *time series* dilakukan atas data tingkat nasional. Penelitian terdahulu terkait pajak daerah umumnya menggunakan model regresi OLS. Penelitian atas pajak daerah dan ekonomi makro dengan model *time series* masih jarang dilakukan. Penelitian ini akan melakukan analisis hubungan antara pajak restoran di Kabupaten Kepulauan Anambas dan indikator ekonomi makro regional dengan model *data time series*. Indikator ekonomi makro yang digunakan adalah tingkat inflasi, tingkat bunga, dan pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB).

Hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah

Ho : tidak terdapat hubungan kausal antara penerimaan pajak restoran dan indikator ekonomi makro daerah.

H1 : terdapat hubungan kausal antara penerimaan pajak restoran dan indikator ekonomi makro daerah (Harun Yüksel, Mehmet Orhan, 2013; Popoola et al., 2017; Ilaboya, 2012; Alista, 2017; Ginanjar, 2012; dan Lestari & Masinabow, 2016)

3. METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan kausal antara pajak restoran, inflasi, tingkat bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Data ekonomi makro, misalnya inflasi, tingkat bunga, dan pertumbuhan ekonomi merupakan data *time series* (Gujarati & Porter, 2009). Dalam penelitian ini data dianalisis dengan model analisis data *time series*. Data yang digunakan adalah data sekunder dari tahun 2012 s.d. 2019. Data tahun 2020 dan 2021 tidak digunakan dalam analisis karena pada tahun tersebut usaha restoran sangat terdampak kebijakan pembatasan kegiatan sosial masa pandemi covid-19.

Data pajak restoran merupakan realisasi penerimaan pajak restoran yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Data pajak restoran dikumpulkan dari Bapenda Kabupaten Kepulauan Anambas. Data inflasi dan produk domestik regional

bruto merupakan data statistik yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Anambas. Tingkat bunga merupakan data statistik yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan berbagai opsi model pendekatan : *vector autoregressive* (VAR), *vector error correction model* (VECM), dan VAR pada tingkat *difference*, tergantung dari karakteristik data *time series* (Rosadi, 2012). Dengan menggunakan software Eviews 12, berikut prosedur analisis data yang dilakukan

1. Uji akar unit (uji stasioneritas data)

Uji stasioneritas data dilakukan dengan uji akar unit menggunakan uji Augmented Dickey Fuller (ADF). Pertama-tama dilakukan uji stasioneritas data pada tingkat level. Jika data tidak stasioner pada tingkat level, akan dilakukan uji stasioner pada tingkat *difference*.

2. Menentukan kandidat model analisis

Berdasarkan hasil uji stasioneritas data, ditentukan beberapa kandidat model analisis yang mungkin sesuai.

3. Pemilihan lag optimum

Pemilihan panjang lag optimum digunakan Akaike Information Criteria (AIC). Panjang lag optimum dipilih berdasarkan lag dengan nilai AIC paling kecil.

4. Uji kointegrasi

Jika hasil uji stasioneritas menunjukkan semua data stasioner pada level, maka digunakan pendekatan analisis model VAR pada level. Jika data stasioner pada tingkat *difference*, akan dilakukan uji kointegrasi. Uji kointegrasi dilakukan dengan *Johansen's cointegration test*. Jika hasil uji kointegrasi signifikan berarti terdapat kointegrasi, yaitu variabel-variabel yang digunakan akan mencapai keseimbangan dalam jangka panjang sehingga model pendekatan yang mungkin dapat digunakan adalah model VECM. Jika tidak terdapat kointegrasi, model yang digunakan adalah VAR pada *difference*.

5. Uji stabilitas model

Uji ini dilakukan untuk memeriksa apakah model yang digunakan stabil.

6. Uji kausalitas

Untuk memeriksa apakah ada hubungan antar variabel pajak restoran, tingkat inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi regional dilakukan uji kausalitas Granger.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Akar Unit (Uji Stasioneritas Data)

Uji akar unit dilakukan menggunakan uji statistik Augmented Dickey-Fuller (ADF). Pertama-tama data diuji stasioneritas pada level. Data stasioner jika nilai probabilitas < 0.05. Jika data tidak stasioner pada level, akan dilakukan uji akar unit pada tingkat *difference*. Hasil uji ditunjukkan pada tabel 4

Tabel 4 Hasil Uji Akar Unit

No	Variabel	Level	1 st Difference
1	LPRESTO	stasioner	stasioner
2	INFLASI	tidak stasioner	stasioner
3	BUNGA	tidak stasioner	stasioner
4	LNPDRB	stasioner	stasioner

Keterangan

LNPRESTO = logaritma natural dari penerimaan pajak restoran

INFLASI = tingkat inflasi

BUNGA = tingkat bunga

LNPDRB = logaritma natural PDRB

Hasil uji akar unit menunjukkan bahwa data LNPRESTO dan LNPDRB stasioner pada data level, sedangkan data INFLASI dan BUNGA stasioner pada *first difference*.

Menentukan Kandidat Model Analisis

Berdasarkan hasil uji stasioneritas data, karena sebagian data stasioner pada level dan Sebagian stasioner pada *difference*, model pendekatan yang mungkin digunakan adalah VECM dan VAR pada *difference*.

Uji Lag Optimum

Hasil uji panjang lag yang optimal dapat ditentukan berdasarkan nilai AIC paling kecil. Tabel 5 menunjukkan nilai AIC paling kecil pada lag 3.

Tabel 5 : Hasil Uji Panjang Lag Optimum
VAR Lag Order Selection Criteria

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-7.644371	NA	2.88e-05	0.895721	1.089274	0.951457
1	164.5289	278.1260	1.78e-10	-11.11760	-10.14984	-10.83892
2	198.5481	44.48668*	4.92e-11*	-12.50370	-10.76172*	-12.00207*
3	214.8452	16.29709	6.33e-11	-12.52655*	-10.01036	-11.80198

Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan untuk memeriksa apakah semua variabel akan menuju keseimbangan dalam jangka panjang. Hasil uji kointegrasi signifikan jika nilai probability < 0.05. Hasil uji kointegrasi pada tabel 6 menunjukkan tidak signifikan sehingga model yang cocok untuk digunakan adalah VAR pada *difference*.

Tabel 6 : Hasil Uji Kointegrasi
COINTEGRATION TEST, probability < 0.05

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)				
Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None	0.332605	35.74417	47.85613	0.4094
At most 1	0.323959	25.23046	29.79707	0.1534
At most 2	0.293862	15.05141	15.49471	0.0582
At most 3*	0.206225	6.004831	3.841465	0.0143

Trace test indicates **no cointegration at the 0.05 level**

Uji Stabilitas Model

Selanjutnya model VAR pada *difference* dengan panjang lag optimum 3 akan dilakukan uji stabilitas model. Hasil uji stabilitas model VAR stabil jika nilai modulus kurang dari satu. Tabel 7 menunjukkan bahwa semua root memiliki nilai modulus kurang dari satu, sehingga model VAR tersebut stabil.

Tabel 7 : Hasil Uji Stabilitas Model

Roots of Characteristic Polynomial

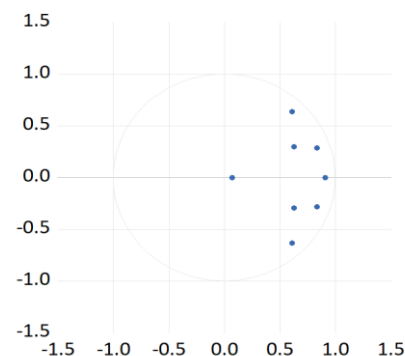
Root	Modulus
0.911585	0.911585
0.835503 - 0.284845i	0.882724
0.835503 + 0.284845i	0.882724
0.613882 - 0.632630i	0.881517
0.613882 + 0.632630i	0.881517
0.630467 - 0.297465i	0.697118
0.630467 + 0.297465i	0.697118
0.074525	0.074525

No root lies outside the unit circle.
VAR satisfies the stability condition.

Model VAR yang stabil juga dapat ditunjukkan pada grafik 3, dimana semua titik biru berada dalam lingkaran.

Grafik 3 : Hasil Uji Stabilitas Model

Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial



Uji Kausalitas Granger

Dalam model VAR semua variabel merupakan variabel endogen. Untuk menentukan hubungan kausal antar variabel dapat digunakan uji kausalitas Granger. Hasil uji kausalitas Granger ditunjukkan pada tabel 8. Nilai probability < 0.05 menunjukkan hubungan kausal signifikan pada $\alpha = 5\%$, nilai probability < 0.10 menunjukkan hubungan kausal signifikan pada $\alpha = 10\%$, sedangkan nilai probability > 0.10 menunjukkan hubungan kausal tidak signifikan.

Tabel 8 : Hasil Uji Kausalitas Granger
Pairwise Granger Causality Tests

Null Hypothesis:	F-Statistic	Prob.
D(INFLASI) does not Granger Cause D(LNPRESTO)	3.47985	0.0331
D(LNPRESTO) does not Granger Cause D(INFLASI)	2.84638	0.0609
D(BUNGA) does not Granger Cause D(LNPRESTO)	2.91679	0.0569
DLN(PRESTO) does not Granger Cause D(BUNGA)	0.48313	0.6974
D(LNPDRB) does not Granger Cause D(LNPRESTO)	2.37288	0.0978
D(LNPRESTO) does not Granger Cause D(LNPDRB)	0.10161	0.9582
D(BUNGA) does not Granger Cause D(INFLASI)	0.51119	0.6787
D(INFLASI) does not Granger Cause D(BUNGA)	3.98993	0.0207
D(LNPDRB) does not Granger Cause D(INFLASI)	3.49228	0.0328
D(INFLASI) does not Granger Cause D(LNPDRB)	0.47624	0.7020
D(LNPDRB) does not Granger Cause D(BUNGA)	1.50425	0.2412
D(BUNGA) does not Granger Cause D(LNPDRB)	0.61004	0.6156

Tabel 8 baris pertama menunjukkan perubahan tingkat inflasi dan perubahan pertumbuhan pajak restoran memiliki hubungan kausal dua arah secara signifikan. Inflasi memengaruhi penerimaan pajak restoran, demikian pula sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yüksel & Orhan (2013) dan Alista (2017). Pajak restoran juga memengaruhi tingkat inflasi. Pajak restoran merupakan pajak konsumsi. Pajak restoran akan ditanggung oleh konsumen, dimana harga makanan dan minuman sudah termasuk pajak restoran.

Kenaikan pajak restoran akan meningkatkan harga makanan dan minuman di restoran dan turut memberikan kontribusi pada tingkat inflasi.

Baris kedua tabel 8 menunjukkan kenaikan tingkat bunga memiliki hubungan searah dengan pertumbuhan pajak restoran secara signifikan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harun Yüksel & Mehmet Orhan (2013) dan Susanto (2018).

Baris ketiga tabel 8 menunjukkan pertumbuhan PDRB memiliki hubungan searah dengan pertumbuhan pajak restoran. Banyak hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi mendorong penerimaan pajak (Harun Yüksel & Mehmet Orhan, 2013; Alista, 2017; Susanto, 2018; Lestari & Masinabow, 2016). Pertumbuhan ekonomi yang baik meningkatkan daya beli masyarakat dan konsumsi makanan minuman di restoran. Hasil penelitian Ilaboya (2012) dan Popoola et al.(2017) yang menyatakan pertumbuhan pajak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (kontraksi ekonomi), pada penelitian ini tidak terbukti. Pertumbuhan pajak yang menyebabkan kontraksi ekonomi tampaknya terjadi jika beban pajak meningkat akibat kebijakan pajak yang baru, sementara besaran ekonomi tetap. Jika kebijakan pajak tidak berubah, hubungan sebaliknya yang terjadi, yaitu pertumbuhan ekonomi memengaruhi pertumbuhan penerimaan pajak.

Baris keempat tabel 8 menunjukkan perubahan tingkat inflasi mempengaruhi tingkat bunga. Untuk menekan laju inflasi, pemerintah akan menerbitkan kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar, antara lain dengan meningkatkan suku bunga.

Baris kelima menunjukkan hubungan searah dimana perubahan pertumbuhan ekonomi akan memengaruhi tingkat inflasi. Menurut teori inflasi, pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat dapat mengakibatkan inflasi (Burton, 1972).

Hubungan kausal antara bunga dan pertumbuhan ekonomi pada penelitian ini tidak terbukti. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tingkat bunga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Susanto, 2018).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam model VAR semua variabel merupakan variabel endogen. Hubungan antar variabel dapat dianalisis menggunakan uji kausalitas Granger. Hasil penelitian menggunakan model VAR atas hubungan pajak restoran dan indikator ekonomi makro di Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausal dua arah antara pajak restoran dan tingkat inflasi. Tingkat bunga dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan searah dengan penerimaan pajak restoran. Tingkat inflasi memiliki hubungan searah dengan tingkat bunga. Pertumbuhan ekonomi regional memengaruhi tingkat inflasi.

Penelitian terkait pajak restoran dengan data makro ekonomi makro dapat dilakukan ke beberapa kabupaten sekaligus sehingga diperoleh data panel. Penggunaan data panel dalam penelitian pajak

restoran dapat meningkatkan reliabilitas hasil penelitian. Selain itu, penelitian perlu menyertakan variabel-variabel bebas yang lain, seperti jumlah kunjungan wisatawan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak restoran.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini hanya menggunakan data terkait Kabupaten Kepulauan Anambas. Penelitian atas pajak restoran dari beberapa kabupaten/kota (penggunaan data panel) akan menghasilkan hasil analisis yang lebih reliabel.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi regional Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki hubungan kausal dengan penerimaan pajak restoran. Dalam kondisi ekonomi yang baik, potensi penerimaan pajak restoran akan meningkat. Hal ini dapat digunakan dalam menetapkan target penerimaan pajak restoran pada saat menyusun APBD. Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas perlu meningkatkan penggunaan teknologi informasi yang akan memudahkan wajib pajak restoran dalam melaporkan dan melakukan pembayaran pajak. Penggunaan teknologi juga meningkatkan pengawasan kepatuhan pajak terhadap wajib pajak restoran. Kepatuhan pajak mendorong terealisasinya penerimaan pajak restoran sesuai dengan potensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alista, H. N. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Jumlah Penerimaan Pajak Hotel (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1-18, c, 1–18.
- Asmuruf, Makdalena F Rumat, V. A., & Kawung, G. M. V. (2015). Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk terhadap Pendapatannya Daerah (Pad) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(05), 732.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau Februari 2022*.
- BPS Kabupaten Anambas. (2021). *Website BPS Kabupaten Kepulauan Anambas* <<https://anambaskab.bps.go.id>>. Website BPS Kabupaten Kepulauan Anambas <<https://Anambaskab.Bps.Go.Id>>.
- Burton, J. (1972). *Theories of Inflation BT - Wage Inflation* (J. Burton (ed.); pp. 15–20). Macmillan Education UK. https://doi.org/10.1007/978-1-349-01407-1_3
- Dewi, N. L. S., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(3).
- Ginanjari, A. T. (2012). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Padang*. Universitas Andalas.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (Fifth Edit). McGraw Hill Education.

- Handaka, R. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Handoyo, Y. D. R. E. (2017). UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH. *Riset Akuntansi Keuangan, Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 115–122. <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/RAK/article/view/220/172>
- Harun Yüksel, Mehmet Orhan, H. Ö. (2013). Tax Revenue and Main Macroeconomics Indicators in Turkey. *European Journal of Economic and Political Studies*, 3(May 2013), 23–38.
- Ilaboya, O. J. (2012). Indirect Tax and Economic Growth. *Research Journal of Finance and Accounting*, 3(11), 70–83.
- Lestari & Masinabow. (2016). Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 306–314.
- Nesare, V. C., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. (2016). Analisis Potensi dan Efektivitas Pungutan Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(4), 4(4), 1229–1238.
- Popoola, A., Jimoh, I., & Oladipo, A. (2017). *Tax Revenue and Nigerian Economic Growth*. 5(11), 75–85.
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 115-122.
- Rosadi, D. (2012). *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan*. Andi.
- Sun'an, M., & Senuk, A. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Mitra Wacana Media.
- Susanto, S. (2018). Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *JEBI | Jurnal Ekonomi Bisnis Indonesia*, 12(01), 52–68. <https://doi.org/10.36310/jebi.v12i01.27>